Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

Posisi Perempuan dalam Pemilu 2024 pada Media Sosial X: Kajian Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Melia Sari[1*], Anwar Ibrahim Triyoga[2]
Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman
Email: morphinks2906@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perempuan diposisikan dalam wacana media sosial, khususnya melalui cuitan/tuturan selama masa pemilu Indonesia 2024. Urgensi penelitian ini berdasarkan pada meluasnya permasalahan yang seharusnya dapat ditilik lebih jauh perihal perempuan di hadapan politik dan masa pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perempuan diposisikan berdasarkan posisi subjek-objek dan pembaca melalui teks. Analisis ini akan dikaji menggunakan pisau analisis wacana kritis Sara Mills. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah cuitan/tuturan berupa teks yang mengandung diskurus mengenai isu perempuan selama pemilu 2024. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah media sosial X. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik sadap dan catat. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik telaah baik secara teks maupun kontek, dan selanjutnya pemaparan mengenai aspek yang menjadi fokus utama pembahasan. Setelah pemaparan mengenai analisis data maka kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa cuitan mengenai isu-isu perempuan selama masa pemilu 2024 dalam media sosial X terdapat tiga isu yang mendominasi yakni (1) kebijakan/produk hukum terkait perempuan, (2) objektifikasi terhadap perempuan, (3) representasi perempuan dalam kontestasi politik. Posisi subjek acapkali dipegang oleh orang atau sekelompok masyarakat dengan pemahaman patriarki. Kemudian posisi objek pada cuitan atau tuturan tersebut seringkali menggambarkan bagaimana perempuan terdegradasi menjadi peran yang pasif. Terkait posisi pembaca terlihat bahwa mayoritas memperkuat pandangan yang merendahkan perempuan, mengabaikan suara dan pengalaman mereka, serta mengukuhkan posisi inferior perempuan dalam masyarakat.
Kata Kunci: media sosial, pemilu, posisi perempuan, wacana

ABSTRACT

This study examines how women are positioned in social media discourse, specifically through tweets/utterances during the 2024 Indonesian general election. The urgency of this research is based on the growing issue that should be further explored regarding women in the face of politics and the election period. To understand how women are positioned based on subject-object roles and readers through texts, this analysis will be conducted using Sara Mills' critical discourse analysis framework. This is a type of library research using a descriptive qualitative approach. The data in this study are tweets/utterances containing discourse on women's issues during the 2024 election. The data source used is the social media platform X. The data were collected using interception and note-taking techniques. The data were then analyzed using both textual and contextual analysis techniques, followed by an explanation of the main aspects to be discussed. After presenting the data analysis, conclusions were drawn. The results of the study show that tweets on women's issues during the 2024 election period on social media X focus on three main issues: policies/legal products related to women, objectification of women, and representation of women in political contests. The subject's position is often held by individuals or groups with patriarchal views. Meanwhile, the object position in these tweets or utterances often portrays women in passive roles. Regarding the position of the reader, the majority reinforces views that degrade women, ignore their voices and experiences, and uphold women's inferior status in society.
Keywords: social media, elections, women's positions, discourse

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi memiliki ciri yang mencakup masyarakat dalam program-program melalui partisipasi politik. Budiardjo (2008:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam dunia politik seperti memilih seorang pemimpin, yang secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Partisipasi politik ini dapat diwujudkan salah satunya dengan pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai medium dalam memberikan mandat kepada orang atau kelompok tertentu untuk mewakili suara masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Sebelum pemilihan umum, terdapat serangkaian kampanye yang dilakukan untuk menggaet suara dari berbagai daerah. Kegiatan kampanye memberikan gambaran untuk masyarakat dalam menilai sosok pasangan calon presiden atau calon legislatif.

Pada tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum untuk pergantian calon presiden dan wakil presiden beserta jajaran legislatif. Dalam menyambut musim politik, para pasangan calon menyiapkan metode kampanye serta program-program yang akan dicanangkan dalam menawarkan kebijakan. Perbincangan mengenai politik mulai menjelajahi laman-laman di sosial media, salah satunya sosial media X. Ketersebaran dan informasi mengenai politik pada sosial media X. Selama masa pemilu 2024, terdapat sejumlah isu-isu mengenai perempuan yang seringkali hadir dalam cuitan media sosial X. Sukar bagi perempuan untuk mencapai ke ranah kekuasaan selama gagasan tentang kekuasaan kerap kali diidentikkan dengan maskulinitas. Menurut Komnas HAM, perempuan termasuk dalam kelompok rentan yang di mana kerap luput dari perhatian pemerintah dalam pembahasan hingga memutuskan kebijakan. Parlemen didominasi oleh laki-laki dan kebijakan yang dihadirkan pun masih belum ramah terhadap pemberdayaan perempuan. Terlebih sebelum menjelang hari pemilu 2024, terdapat sejumlah pengkerdilan bahkan objektifikasi terhadap perempuan yang kerap kali terjadi yaitu, pelecehan terhadap perempuan di ruang publik pada kegiatan kampanye serta terdapat objektifikasi perempuan melalui *buzzer* pasangan calon. Selain itu dalam media sosial X, terdapat sejumlah keresahan terhadap partai yang memiliki *track record* menolak payung hukum untuk perlindungan perempuan. Hal ini mengundang berbagai pendapat mengenai sudut pandang dalam hal tersebut. Jajaran calon legislatif yang akan menduduki parlemen merupakan faktor penting yang diperhatikan dalam mengawal kebijakan yang pro terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Dalam rentang waktu Desember 2023 hingga Februari 2024, isu-isu perempuan yang berkaitan dengan pemilu 2024 menjadi pertimbangan bagaimana perempuan memilih pasangan calon dan jajarannya. Hal ini dapat dilihat bagaimana teks atau bahasa yang digunakan dalam membahas isu-isu perempuan.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya, yakni Puti Embun Sari, Eka marianti, Siska Lusia Putri pada tahun 2024 yang berjudul "Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon Dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024". Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara penampilan calon, pemilih dengan pengetahuan politik rendah, dan evaluasi pemilih perempuan terhadap calon perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Sumatera Barat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pemilih perempuan terhadap calon perempuan dalam konteks politik lokal. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan melalui populasi, sampel, dan unit analisis *(Significance testing results of the structural model path coefficients)*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *Candidates Appearance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Candidates Evaluations* pada pemilih legislatif di Sumatera Barat. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada pendekatan atau teori yang digunakan serta objek penelitian. Sedangkan, persamaannya

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

terletak pada objek dengan mengaitkan pemilu 2024 dan perempuan. Penelitian relevan selanjutnya berasal dari Faisal Kemal dan Taufik Indarto (2023) yang berjudul "Stereotipe Perempuan Dalam Wacana Pemberitaan Pra-Pemilu 2024 Pada Media Massa Daring". Tujuan penelitian tersebutu adalah mengkaji kencenderungan kuasa media dalam mewacanakan perempuan berpolitik yang difokuskan dalam penggunaan bahasa. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa stereotipe perempuan di dalam kancah politik di Indonesia masih lemah. Itu ditunjukkan oleh adanya rencana pengurangan kuota caleg perempuan karena skema pembulatan ke bawah. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pada pendekatan teori yang digunakan serta data dan sumber data. Sedangkan persamaan terletak pada konteks politik/pemilu 2024 dan perempuan.

Urgensi penelitian ini berdasarkan pada meluasnya permasalahan yang seharusnya dapat ditilik lebih jauh perihal perempuan di hadapan politik dan masa pemilu. Pemilihan media sosial X pun didasari pada persebaran informasi yang begitu masif serta responsif dan isu perempuan yang dihadirkan pun beragam. Maka dari itu, melihat posisi dan representasi perempuan dalam pemilu 2024 dapat ditinjau dengan pisau analisis wacana kritis Sara Mills karena berperspektif feminis. Sara Mills menekankan pada posisi subjek-objek dan posisi pembaca. Pada analisis wacana kritis, Mills (1995) juga berfokus pada posisi media, representatif dan feminisme. Dalam hal ini permasalahan gender dan ideologi dalam linguistik serta bagaimana hubungan subjek dan objek dibentuk dalam suatu teks dan konteks. Terlebih juga perihal kekuasaan gender dalam objek linguistik dalam media sosial X. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul "Posisi Perempuan dalam Pemilu 2024 pada Media Sosial X: Kajian Analisis Wacana Kritis Sara Mills."

B. LANDASAN TEORI

1. Wacana

Wacana tidak bisa terlepas dari konteks (situasi) yang melingkunginya. Dalam analisis wacana terdapat adanya tiga sudut pandang tentang bahasa. Pendapat pertama, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pandangan kedua, subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Jadi analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu (Eriyanto, 2006:5).

Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi. Analisis wacana kritis merupakan teori untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya. Analisis wacana menyelidiki kelompok sosial yang bertarung melalui bahasa. Kajian tentang wacana secara kritis dapat dilakukan pada penulisan berita, novel, cerpen dan pada media gambar. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa wacana memiliki jangkauan suatu gagasan dan konsep suatu teks sehingga wacana memiliki kedudukan yang lebih luas dari klausa dan kalimat (Rohana & Syamsuddin, 2015).

2. Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Analisis wacana kritis Sara Mills menelaah bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks. Mills melihat bahwa perempuan secara sosial sering dikonstruksikan sebagai pihak yang dimarjinalkan dalam teks dan selalu dalam posisi yang inferior. Titik perhatian Sara Mills terutama pada masalah-masalah feminis (Darma, 2009: 85). Selain itu yang menjadi pokok utama yakni

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

terdapat tiga tahapan dalam analisis model Sara Mills. Berikut merupakan tiga level analisis yang diusulkan oleh Sara Mills (1995: 62-156):

a. Analisis pada level kata (seksisme dalam bahasa, seksisme dan maknanya).
b. Analisis pada level frasa kalimat (penamaan, pelecehan pada perempuan, pengkerdilan, penghalusan).
c. Analisis pada level wacana.

Analisis wacana kritis model Sara Mills ini merujuk pada bagaimana perempuan digambarkan dalam dan dimarjinalkan dalam teks baik berita, novel, gambar, foto, atau film, serta bagaimana pola pemarjinalan itu dilakukan. Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi actor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam artian siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan yang akan menentukan bagaimana struktur teks serta pemaknaan dalam teks. Selain posisi subjek-objek dalam teks, Sara Mills juga memberikan perhatian pada bagaimana pembaca dan bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca menempatkan dirinya dalam sebuah teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan bagaimana berpengaruh terhadap pemahaman terhadap teks tersebut.

a) Posisi Subjek-Objek

Sara Mills menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai posisi gagasan atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Posisi itulah yang menentukan semua unsur teks, dalam arti pihak yang mempunyai posisi tinggi untuk mendefinisikan realitas akan menampilkan kelompok lain ke dalam bentuk struktur wacana tertentu yang akan hadir kepada khalayak. Pemosisian satu kelompok pada umumnya membuat membuat satu kelompok tertentu menjadi lebih superior dan kelompok lain menjadi sasaran marjinalisasi. Analisis atas bagaimana posisi-posisi ini ditampilkan secara luas akan bisa membuktikan bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. Dalam hal ini, bagaimana posisi ini turut memarjinalkan posisi perempuan ketika ditampilkan dalam pemberitaan atau teks (Diah, dkk, 2020:200)

b) Posisi Pembaca

Sara Mills turut menyertakan bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Pembaca di sini tidaklah dianggap sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan interaksi sebagaimana akan terlihat dalam teks. Bagi Sara Mills, membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain, mempunyai sejumlah kelebihan. Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. Kedua, posisi pembaca di sini ditempatkan dalam posisi yang penting karena teks ditujukan untuk berkomunikasi secara langsung kepada khalayak (Diah, dkk, 2020:203).

3. Perempuan dan Politik

Terdapat suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki. Perempuan berjuang untuk tranformasi peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik sebagai pembuktian akutalisasi diri untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sudah seharusnya, persoalan perempuan berada di tangan perempuan juga. Isu-isu gender masih sering kali mempengaruhi bagaimana perempuan digambarkan dan dipersepsikan dalam dunia politik. Pada 2004, terdapat kebijakan affirmative action yang memberi kemudahan perempuan dalam berpolitik. Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. *Affirmative action* pencalonan perempuan minimal 30% di Indonesia adalah suatu langkah yang tepat dalam konteks menghadirkan dan membentuk sejarah pengalaman politik perempuan yang diraih dari hasil

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

menghadirkan identitas dan kepentingannya dalam antagonisme politik yang ada. Artinya, kehadiran perempuan melalui proses pertarungan dan kontestasi elektoral melalui dorongan pencalonan merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun di dalam partai politik. (Dirga Ardiansa, 2016:78). Keterwakilan perempuan diharapkan menjadi corong untuk menghadirkan kebijakan dan aktivitas politik yang menyejahterakan perempuan.

4. Pemilu

Pemilihan umum merupaka salah satu proses implementasi dari demokrasi di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan calon pemimpin bagi mereka (Nasir, 2020:42). Secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurren elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal (Haris, dkk., 2014: 15).

5. Media Sosial X

Media sosial X berisi cuitan yang umumnya didominasi oleh teks. Terdapat fitur *reposted*, *quote reposting*, *comment*, serta *trending*. Media sosial X tak terbatas ruang dan waktu, penyampaian dan penerimaan informasi yang cepat, eksistensi diri serta mencari relasi atau teman baru. Mengunggah teks di media sosial dapat menimbulkan bola liar yang di mana asumsi dan perspektif orang lain juga akan ikut berpartisipasi dalam sebuah diskursus dalam media sosial X. Pengguna media sosial X juga menjadi saluran baru dalam komunikasi politik yang masif dipakai selama pilpres 2024. Karakternya yang interaktif, partisipatif dan terdesentralisasi menjadi latar belakang optimisme para ahli akan kemampuan media baru (Hasfi dkk, 2015: 270).

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data dan sumber data yang diperlukan tidak harus turun ke lapangan, yakni dengan menggunakan objek penelitian berupa cuitan mengenai isu perempuan di media sosial X. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan data dalam bentuk teks atau kebahasaan. Penelitian ini tidak berpandangan bahwa sesuatu memang demikian adanya, tetapi harus ditelaah berdasarkan pertimbangan ilmiah yang digunakan dengan pisau analisis kajiannya (Djajasudarma, 2010:16-17). Data dalam penelitian ini berupa cuitan teks mengenai perempuan selama masa pemilu 2024 melalui media sosial X dalam rentang dimulai pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024. Sumber data penelitian ini yaitu media sosial X. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode simak dan teknik sadap. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan. Teori padan merupakan *extralingua* atau pemaknaan interpretasi berdasarkan konteks. Menurut Sudaryanto (2015:15), metode padan, yakni alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang digunakan. Penyajian data yang sering digunakan menyusun temuan dalam bentuk laporan tertulis yang terstruktur dan naratif.

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Subjek dan Kekuasaan dalam Cuitan di Media Sosial X

a. Kebijakan/Produk Hukum Terkait Perempuan

Data (01)

a) Posisi Subjek-Objek

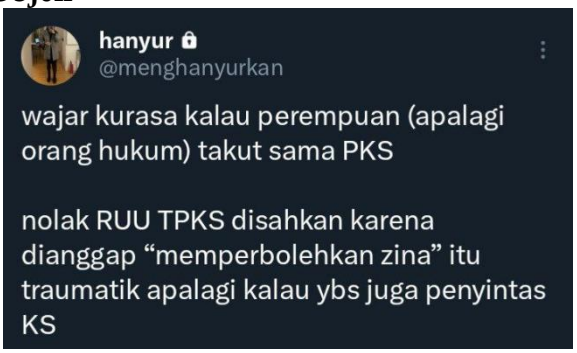

Gambar 4.1

Pada data tersebut merupakan sebuah cuitan yang berdasarkan pada konteks permasalahan mengenai salah satu partai politik tertentu yakni PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Dilansir dari laman bbc.com, dalam pembahasan tingkat I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna. Cuitan ini termasuk ke dalam diskursus selama masa pemilu 2024 tentang bagaimana *track record* partai politik. Hal ini penting untuk menimbang-nimbang partai mana yang akan dicoblos. Pada cuitan tersebut mengandung kata "takut" dan "traumatik" yang mengindikasikan bahwa posisi perempuan sangat rentan hingga merasa gentar terhadap sesuatu yang berdampak buruk bagi mereka, dalam hal ini terkait konteks mengenai ketakutan perempuan terhadap ketidakberpihakan produk hukum untuk perempuan. Terkait cuitan tersebut, pengguna X tersebut mempermasalahkan PKS dalam *track record*-nya yang pernah menolak RUU TPKS untuk disahkan. Alasan mereka menolak adalah RUU TPKS dianggap melegalkan zina. Dilansir dari laman republika.com, fraksi PKS ingin bahwa tindak pidana kekerasan seksual jangan dipisahkan dengan permasalahan seks bebas dan seks menyimpang. RUU TPKS dinilai tidak efektif karena menimbulkan bias tafsir. Apabila menilai tanggapan dari fraksi PKS tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat miskonsepsi terkait pemahaman terhadap definisi kekerasan seksual dan yang bukan termasuk bagian dari ranah kekerasan seksual. Dilihat dari runutan permasalahan tersebut, dalam konteks pemilu 2024 terlihat bahwa dengan adanya sejumlah kekhawatiran yang terindikasi melalui media sosial X terkait keberpihakan partai yang menjadi calon legislatif dalam hal pandangan mengenai produk hukum yang melindungi perempuan. Kekhawatiran tersebut ada karena selama ini perempuan ditempatkan pada posisi objek yang hak-haknya masih belum terpenuhi untuk mendapat perlindungan hukum. Maka dari itu, ketidaksetujuan fraksi PKS terhadap RUU TPKS apabila ditarik akarnya terdapat adanya asumsi yang berkaitan dengan kepercayaan dan pemahaman nilai moral masing-masing terhadap permasalahan kekerasan seksual ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang berbasis Islam konservatif. Adanya latar belakang tersebut menyebabkan benturan pemahaman dengan masyarakat progresif.

Pada beberapa kultur, banyak diskusi publik tentang seksualitas terkhusus menyangkut perempuan itu terstigmatisasi. Ketika dihadapkan pada kasus kekerasan

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

seksual, masih ada yang berfokus pada perilaku atau penampilan korban dibanding tindakan pelaku. Konteks budaya ini juga dapat mengarah kepada orang-orang yang menganggap insiden tersebut layaknya yang disebut zina, serta melanggengkan budaya victim blaming. Kemudian si pemangku kebijakan merupakan subjek dalam mewujudkan bagaimana realisasi produk hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang menduduki parlemen memiliki kuasa lebih untuk mengarahkan produk hukum, sedangkan perempuan yang sadar mengenai hak-haknya mendesak produk hukum terkait perlindungan dan pemberdayaan pada kebijakan yang ditentukan oleh parlemen.

b) Posisi Pembaca

Gambar 4.2

Sebutan feminazi telah menjadi ekspresi stigmatisasi yang terkenal, label atau penghinaan di arus utama, online dan media sosial. Itu telah menjadi penghinaan yang terkenal di media massa dan sosial, dan merupakan label yang sering menjadi topik yang didiskusikan dalam ranah meta-linguistik tentang pengertian, referensi, dan penggunaan kata yang ofensif. Kemudian salah seorang feminis yakni Chimamanda Ngozi Adichie juga menyoroti sebutan tersebut.

The idea of feminism can be taboo to some of society. The strong and independent women attempting to create an equal society are being shut down by the misogynistic label feminazi. Being a "feminazi" is muchmore than just someone saying, "you think women should always be in charge, you don't wear make-up, you don't shave, you're always angry" (Adichie, 2014:11).

Chimamanda Ngozi Adichie menjelaskan bahwa konsep feminisme merupakan sebuah hal yang tabu untuk beberapa masyarakat. Sebutan feminazi merupakan salah satu penyebutan degradasi terhadap perempuan karena pada realitasnya setiap hari perempuan dihadapkan dengan peristiwa ketidakadilan gender yang dialami. Sebutan tersebut tergolong misoginis karena akumulasi sebutan tersebut lahir tanpa adanya proses dialog atau pemahaman terhadap apa yang diperjuangkan. Sebutan feminazi tergolong mengobjektifikasi dan menghina karena menggabungkan kata "feminis" dan "Nazi", yang mengimplikasikan bahwa feminis yang lantang mengadvokasi perihal kesetaraan gender adalah sama halnya dengan para Nazi yang ekstrem dan opresif. Penggunaan kata "nazi" sebagai akhiran terhadap feminis menunjukkan bahwa desakan untuk kesetaraan merupakan hal yang agresif dan berakar dari pemahaman bahwa perempuan harus diam atau patuh. Feminazi merupakan sebutan yang menginvalidasi pengalaman perempuan dan mereduksi perjuangan advokasi sebagai hal yang mengerikan dan jahat. Hal yang menjadi problema yang diangkat akun @menghanyurkan terkait RUU TPKS yang menentukan hidup mati perempuan, terkhusus penyintas kekerasan seksual. Sebutan feminazi untuk perempuan yang pro perlindungan perempuan sangat tidak berdasarkan dan murni ketidakmauan untuk memahami realitas yang dialami perempuan. Maka dari itu, posisi pembaca yang dilihat dari cuitan akun tersebut masih berputar pada sensasi atau ketidaksukaan secara personal dibandingkan kesadaran untuk memahami isu kekerasan

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

seksual. Terlebih cuitan tersebut diunggah oleh seorang laki-laki. Bagaimana pun sebuah perjuangan perempuan untuk pemberdayaan yang lebih baik tentu laki-laki pun harus berpartisipasi karena laki-laki masih menjadi mayoritas dalam dunia politik.

Data (02)

a) Posisi Subjek-Objek

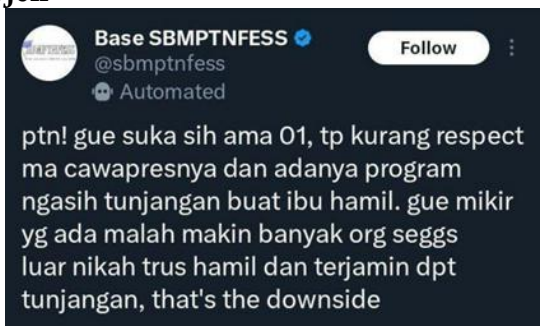

Gambar 4.3

Pada data tersebut berasal dari sebuah akun *menfess* untuk anak-anak yang memperoleh informasi terkain SBMPTN. Cuitan tersebut dilontarkan melalui anonimitas yang tidak diketahui siapa penulis di balik teks tersebut. Penggunaan anonimitas sering digunakan dalam menyerbarkan wacana oleh mereka yang ingin melanggengkan nilai patriarki tanpa menghadapi konsekuensi langsung. Dengan menyebarkan pandangan misoginis secara anaonim, pelaku membentuk normalisasi terhadap opininya meskipun sebenarnya berbahaya dan berbasis kebencian. Anonimitas dalam hal ini menjadi alat dalam media sosial untuk menyebakan wacana patriarki karena mempermudah normalisasi ide-ide seksis dan misoginis. Kemudian kembali pada teks tersebut, konteks pernyataan pada cuitan tersebut merujuk pada salah satu program pasangan calon nomor urut 01, Anies-Imin, dalam hal memberi tunjangan untuk ibu hamil. Akun tersebut mengaitkan program paslon 01 dengan probabilitas orang untuk melakukan seks bebas agar mendapat tunjangan. Cuitan tersebut memiliki posisi kontra terhadap program cuti suami 40 hari dan menyandingkan frasa "tunjangan ibu hamil" beserta "seks di luar nikah" merupakan sesat pikir dan melanggengkan miskonsepsi.

Di Indonesia, norma budaya dan relijiusitas memainkan peran yang penting dalam membentuk opini publik. Masih banyak stigmatisasi terhadap mereka yang hamil di luar nikah yang dianggap tabu atau salah secara moral. Ketika orang mendengar tentang kebijakan tunjangan ibu hamil, pemahaman mereka malah tertuju pada menormalisasi kahmilan di luar nikah. Hal ini menciptakan bias pemahaman yang merupakan akar dari kurangnya kesadaran dan kurangnya edukasi. Hal serupa yang merupakan kesalahan berpikir juga terdapat pada saat RUU TPKS. Banyak masyarakat berpaham patriarki yang tidak setuju dengan RUU TPKS karena dianggap melegalkan seks bebas. Padahal kedua hal tersebut tidak ada kaitannya. Inilah pentingnya untuk memahami duduk perkara terkait isu perempuan. Bahwa masih banyak miskonsepsi terhadap kebijakan yang memberdayakan perempuan karena masyarakat patriarki sendiri mengganggap isu perempuan bukanlah isu yang perlu diperhatikan. Ketidaksetujuan tersebut seringkali dating dari budaya patriarki yang menstigmatisasi, miskonsepsi, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya program seperti tunjangan ibu hamil. Maka dari itu, berasal dari banyaknya miskonsepsi termasuk pada cuitan tersebut, posisi subjek terletak pada masyarakat patriarki yang enggan memahami isu-isu perempuan. Hal ini cukup banyak dan seringkali menghambat kebijakan pemberdayaan perempuan. Kemudian, posisi objeknya ialah pada perempuan yang seharusnya mendapat hak dari kebijakan

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

pemberdayaan perempuan tersebut dan bergantung pada suara terbanyak terhadap kebijakan tersebut.

b) Posisi Pembaca

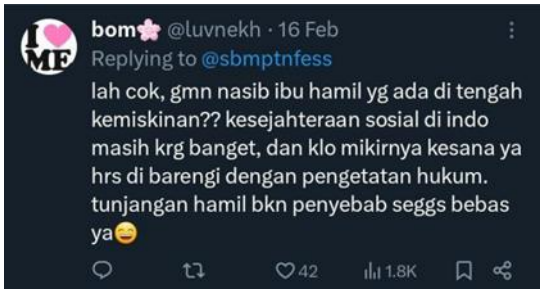

Gambar 4.4

Posisi pembaca yang dilontarkan melalui pemilik akun *@luvnekh,* yaitu berisi kritikan terhadap cuitan awal dengan pernyataan merujuk pada bagaimana kondisi ibu hamil dengan latar belakang kelas menengah ke bawah apabila tidak mendapat tunjangan dan mengatakan tidak ada kaitan antara tunjangan dan seks bebas. Cuitan tersebut memiliki posisi pro terhadap kesejahteraan perempuan. Terlihat dari pemilihan diksi "kemiskinan" dan "kesejahteraan sosial" yang disandingkan. Hal ini benar karena pemilik akun *@luvnekh,* paham khususnya pada permasalahan kelas sosial yang seringkali tidak berpihak pada perempuan kelas menengah ke bawah.

Dalam analisis kritis Sara Mills yang berkaitan dengan teori naratif dan representatif, perempuan miskin perlu disertakan dalam teks representasi karena mereka membawa perspektif yang seringkali terpinggirkan dalam wacana dominan. Dengan menempatkan perempuan miskin dalam teks, pembaca dapat memahami bagaimana kelas, gender, dan kekuasaan saling berinteraksi untuk menciptakan ketidakadilan. Hal ini membantu menggugat stereotip dengan memberikan suara pada mereka yang terpinggirkan dan menciptakan wacana yang lebih inklusif. Kemudian untuk lebih dalamnya pada kerangka feminisme interseksional, perempuan yang hidup dalam kemiskinan perlu menjadi prioritas utama karena mereka berada di persimpangan berbagai bentuk penindasan, seperti gender, kelas, dan ras. Terlebih, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan solusi individu atau menyalahkan keadaan masing-masing individu saja. Kemiskinan membuat perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, baik di rumah maupun di tempat kerja, dan perlu untuk dibenahi secara sistematis oleh pemerintah.

Pada banyak diskursus, perempuan yang berasal dari kelas bawah seringkali diposisikan sebagai kelompok marjinal. Mereka seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang rentan dan tidak berdaya. Penggambaran oleh persepsi masyarakat ini seringkali berujung pada menyalahkan individu tersebut alih-alih mengkritik isu-isu sistemik seperti kemiskinan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Problema kemiskinan seringkali dianggap sebagai suatu kegagalan individu. Perempuan dalam kelompok miskin seringkali memiliki akses terbatas ke pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan ksehatan, dan hak dasar lainnya. Terlebih, pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak bagi seluruh masyarakat, bukan privilese untuk segelintir orang. Maka dari itu, perlu disadari bahwa perempuan dari dari kelompok miskin cenderung menghadapi diskriminasi yang lebih kompleks daripada perempuan yang hanya mengalami salah satu bentuk penindasan. Dengan mengimplikasikan program tunjangan tersebut, maka menjadi penanda bahwa perempuan terlepas dari kelas sosialnya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

b. Objektifikasi Terhadap Perempuan

Data (03)

a) Posisi Subjek-Objek

Gambar 4.5

Baliho tersebut berisikan slogan: **"Selain Cari Suara, juga Cari Istri"**. Hal ini merupakan salah satu bentuk objektifikasi terhadap perempuan karena menyetarakan suara mereka dengan perempuan yang bisa didapatkan. Hal tersebut terkesan suara (dalam artian pemilih) dan perempuan layaknya properti. Selain itu, kalimat tersebut melanggengkan objektifikasi terhadap perempuan dalam rangka pemilu. Baliho tersebut merupakan salah satu contoh kampanye yang menggunakan perempuan untuk menggaet suara. Calon legislatif tersebut, yang sebagai subjek, mencari suara dan istri layaknya perempuan merupakan objek pasif yang bisa dimenangkan atau diakui. Penggunaan slogan yang seksis sebagai metode kampanye merupakan upaya menormalisasi dalam diskursus politik. Calon legislatif tersebut melegitimasi pernyataan dan lelucon seksis yang memperkuat gagasan bahwa penggunaan bahasa semacam itu dapat diterima di ruang publik, khususnya politik. Tentu gambar dalam cuitan tersebut merupakan satu dari sekian banyak penggunaan diksi yang seksis terhadap perempuan. Mills mengkritik ini sebagai sebuah strategi penggunaan bahasa yang menginvalidasi kekhawatiran perempuan dengan menggunakan humor untuk memarjinalisasi.

Dalam analisis Sara Mills, penggunaan diksi dalam baliho tersebut merupakan contoh bagaimana wacana patriarki mendistorsi representasi perempuan dalam politik. Perempuan tidak dipandang sebagai individu yang setara, melainkan sebagai objek dalam narasi yang hanya menguntungkan calon laki-laki. Maka dapat dilihat bahwa posisi subjek berada pada para caleg dan tim kampanye yang masih dikuasai pemikiran seksis, lalu posisi objek ialah perempuan yang menjadi target caleg tersebut. Slogan **"Selain mencari suara, juga mencari istri"**, mencerminkan wacana patriarki yang mengakar berupa objektifikasi perempuan, mengerdilkan keterlibatan perempuan dalam politik, serta memperkuat konstruksi peran gender. Hal ini memosisikan calon legislatif (laki-laki) tersebut sebagai subjek dan yang mempunyai kuasa, sementara perempuan diposisikan sebagai objek pasif.

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

b) Posisi Pembaca

Gambar 4.6

Pada data tersebut, posisi pembaca ialah berada pada posisi kontra dan turut mengkritik tim serta metode kampanye yang seksis tersebut. Pengguna tersebut mempertanyakan mengapa hal tersebut dikapitalisasi oleh tim kampanye. Menggarisbawahi kata "dikapitalisasi" yang menguraikan perihal strategi kapitalisasi pada dinamika media yang di mana pernyataan sensasional atau kontroversial sering mendapat perhatian lebih dibanding diskusi perihal kebijakan yang substantif. Pemilih yang memilih caleg tersebut bisa jadi mencerminkan nilai-nilai patriarki pula. Dengan menggunakan humor seksis tersebut sebagai alat untuk memobilisasi suara yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa tidak sehatnya metode-metode kampanye yang dilakukan para pejabat atau caleg untuk menggaet suara.

Data (04)

a) Posisi Subjek-Objek

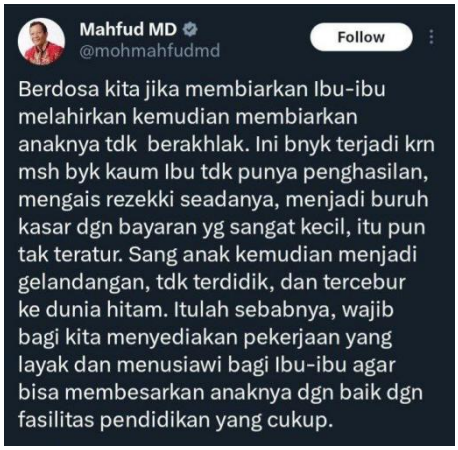

Gambar 4.7

Cuitan yang dilontarkan Mahfud MD termasuk pemikiran yang masih mengkotakkan perempuan hanya dalam peran domestik saja. Mahfud MD menyatakan pernyataan seksis yang kaitannya dengan peran gender (*gender role*).

It may be possible to argue that they are simply a record in the language and are not activated when the words are used, but I would argue that these types of language-usage can be seen to play an active part in the production of ways of thinking about gender roles (Mills, 1995:78).

Seperti yang diketahui bahwa perempuan selama ini dikerangkeng dalam pemahaman patriarkis seperti anggapan peran perempuan itu sudah kodratnya mengurus dapur dan anak. Dengan secara khusus menyalahkan ibu, cuitan tersebut mengesampingkan peran ayah. Padahal tugas mengurus anak adalah kewajiban ibu dan ayah. Cuitan Mahfud MD menihilkan peran ayah yang juga seharusnya berfungsi dalam tumbuh kembang anak. Terlebih, menyerahkan pengasuhan anak seluruhnya kepada Ibu menyuburkan beban perempuan yang bekerja menjadi berlipat ganda. Pernyataan tersebut berfungsi sebagai alat

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

kekuasaan, yang tida hanya memarjinalkan peran ibu tetapi juga menggunakan platform media sosial untuk memengaruhi persepsi publik tentang perempuan dan peran sosial mereka. Wacana semacam ini dapat memengaruhi sikap publik, melanggengkan stigma mengenai para ibu dan memperkuat tekanan pada perempuan dalam memenuhi standar pengasuhan yang tidak realistis. Terlebih, sebelumnya sempat ramai pendapat Mahfud MD yang menyalahkan istri perihal suami yang korupsi. Maka dari cuitan tersebut tergambar bahwa perempuan dianggap sebagai objek yang direduksi makna kehadirannya dari perannya sebagai Ibu. Sedangkan, subjeknya ialah Mahfud MD yang seorang laki-laki dengan pandangan misoginisnya.

b) Posisi Pembaca

Gambar 4.8

Pada data tersebut ialah cuitan yang dilontarkan oleh pemilik akun *@Barck_14*, menggambarkan bagaimana seorang laki-laki melihat keberhasilan perempuan hanya pada ranah domestik. Ia melihat keberhargaan diri perempuan yaitu sebagai Ibu yang mengasuh anak, bukan pada perempuan sebagai dirinya sendiri. Hal ini termasuk dalam pernyataan seksis dan masih umum di pandangan laki-laki patriarkis yang menganggap peran perempuan hanya sebagai Ibu. Cuitan tersebut perlu dibongkar dari segi bagaimana selama ini perempuan selalu dilekatkan pada sesuatu di luar dirinya, seperti orang tua, suami, dan anak. Contohnya anggapan bahwa anak perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya, kemudian setelah menikah tanggung jawab itu diserahkan kepada suaminya. Hal tersebut merupakan contoh bagaimana perempuan tidak dapat menjadi subjek bagi dirinya sendiri.

c. Representasi Perempuan dalam Kontestasi Politik

Data (04)

a) Posisi Subjek-Objek

Gambar 4.9

Konteks pada cuitan tersebut mengenai diskursus isu keberpihakan terhadap pemberdayaan perempuan serta representasi yang tidak semu saja. Pada data tersebut masih menjadi bagian serangkaian dalam diskursus track record PKS. Pengguna akun

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

@herricahyadi (laki-laki), menyanggah pernyataan bahwa PKS menjadi sebuah ancaman bagi perempuan. Pengguna tersebut membuat cuitan berisi pernyataan sebuah data bahwa PKS adalah satu-satunya partai yng memenuhi kuota 30 % bagi perempuan. Pernyataan tersebut merupakan sebuah sindiran terhadap orang-orang yang mengkritik PKS. Pengguna tersebut hanya melihat pada persentase perempuan dalam sebuah partai menjadi satu-satunya cara meningkatkan pemberdayaan perempuan. Padahal representasi hadirnya perempuan saja tidaklah cukup. Perlu adanya sebuah kebijakan yang melindungi perempuan dalam level inklusif. Kehadiran perempuan saja tanpa adanya kebijakan yang melindungi perempuan khususnya perempuan kelas menengah dan menengah ke bawah hanya akan menjadi representasi semu. Hal tersebut karena tentu saja ada perempuan dari kelas borjuis yang tergabung dalam pemerintahan tetapi hanya menguntungkan kelompoknya. Dalam artian, ada perempuan yang menindas perempuan lain.

Berhubungan dengan interseksional, apabila membuat kebijakan tentulah berdasarkan pemahaman analisis kelas. Pembahasan mengenai interseksionalitas, dalam kajian gender dapat dikategorikan sebagai diskriminasi dan penindasan ganda dalam lapisan diskriminasi. Sebuah kebijakan perlu memahami permasalahan sampai ke akar rumput. Cuitan tersebut keluar dari akun laki-laki. Pengguna tersebut tidak memahami bagaimana krusialnya UU TPKS ini untuk perempuan. Dapat dianggap apabila hanya mengandalkan representasi jumlah saja, hal tersebut sama dengan hanya menyerahkan *bare minimum* untuk perempuan. Maka dari itu, posisi subjek terletak pada akun laki-laki yang membela PKS berdasarkan persentase kuota perempuan dan objeknya ialah perempuan yang menuntut untuk disahkannya UU TPKS karena harus melawan pihak-pihak yang menyalahgunakan istilah kekerasan seksual menjadi seks bebas.

b) Posisi Pembaca

Gambar 4.10

Pada data tersebut, posisi pembaca menyebut kata-kata seperti "**zina**", "**kumpul kebo**", "**sjw**", hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang memperjuangkan haknya dikerdilkan oleh sebutan-sebutan tersebut. Mulai dari kata "**sjw**", yang berartikan *Social Justice Warrior*, sebutan ini untuk orang-orang yang memperjuangkan keadilan sosial, kini konotasinya menjadi negatif. Hingga pada kalimat: "**Sebenarnya sjw ini cuma pengen zina alias kumpul kebo itu legal**". Wacana patriarki ini bekerja untuk mendominasi dan mestereotipkan perempuan. Perkataan tersebut digunakan untuk merendahkan perempuan yang tidak mengikuti norma sosial atau moral yang dibentuk patriarki dan membuat perempuan yang mengkritik struktur kekuasaan terlihat tidak sah. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana patriarki berusaha menjaga posisi dominannya dengan mengunci perempuan dalam peran yang terbatas.

Perempuan yang berusaha mengekspresikan diri atau melawan struktur patriarkal di media sosial sering kali dihina dan diserang secara verbal dengan menggunakan istilah-istilah tersebut untuk membungkam suara mereka dan memposisikan mereka dalam peran yang

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

lebih subordinat. Kalimat tersebut merupakan contoh dari upaya untuk mendiskreditkan perjuangan perempuan sehingga memperlemah legimitasi perjuangan mereka. Persepsi akun tersebut masih seputar para perempuan progresif sama artinya dengan melawan tatanan yang ada atau ingin melakukan perbuatan sesuka hati. Memang terdapat banyak aliran feminis, tetapi perlu diketahui generalisir semua feminis termasuk dalam kesalahan logika tanpa mau mendengarkan narasi perempuan yang benar-benar memperjuangkan perempuan secara inklusif. Kemudian kalimat "**seks bebas jangan pidana dong kan ada consent**" menunjukkan bahwa kata *consent* masih belum dipahami masyarakat. Istilah consent adalah persetujuan kedua belah pihak dalam sesuatu hal. Pengguna tersebut menyertakan seks bebas harus dipidana, padahal mengurus seks bebas bukan kewenangan negara karena hal tersebut bersifat privasi. Apabila seks bebas tersebut dipidana maka akan menjadi pasal-pasal karet yang susah ditakar secara mutlak.

E. Refleksi Kritis atas Dinamika Ideologis di Media Sosial

Media sosial mempunyai pengaruh untuk membentuk wacana publik mengenai hal tertentu, khususnya permasalahan gender. Pada era digital, media sosial menjadi wadah medan perang untuk diskursus politik dan ideologis selama masa pemilu. Media sosial menciptakan wacana yang dapat membentuk ideologi berdasarkan algoritma dan interaksi sesama pengguna. Dinamika ideologis yang dihadirkan dapat berarti bagaimana sebuah narasi begitu cepat beralih, berdasarkan trending/viral serta figur-figur tertentu. Media sosial memfasilitasi relasi kuasa dan ideologi yang mendominasi. Termasuk seperti halnya isu objektifikasi perempuan dalam diskursus politik di media sosial yang bersanding dengan ideologi patriarkis. Terlebih, anonimitas dalam media sosial menjadi ladang kesempatan untuk menyebarkan narasi yang seringkali mengerdilkan perempuan. Pengerdilan maupun objektifikasi tersebut merupakan strategi kampanye politik untuk mendiskreditkan perempuan berdasarkan gender mereka dibanding ide politik atau kompetensi yang dimiliki. Media sosial memainkan peran yang signifikan pula terhadap hal tersebut dan mengenai bagaimana pengguna media sosial membuat reaksi emosional yang mengarah pada komentar-komentar seksis dan misoginis.

F. PENUTUP

Dalam penelitian ini, ditemukan tiga isu yang mendominasi selama masa pemilu 2024 di media sosial X, yakni (1) kebijakan/produk hukum terkait perempuan, (2) objektifikasi terhadap perempuan, (3) representasi perempuan dalam kontestasi politik. Berdasarkan masing-masing isu tersebut, ditemukan bahwa posisi subjek mengarah pada mayoritas cuitan yang dilontarkan oleh orang/kelompok masyarakat dengan pemahaman patriarki, yang di mana nilai-nilai patriarkal mendominasi diskursus tersebut. Pandangan yang tergambar oleh subjek-subjek ini sering kali memuat pandangan seksis yang mendiskreditkan perempuan. Dalam banyak cuitan, perempuan digambarkan hanya berdasarkan peran domestik, sebutan yang merendahkan, atau penampilan fisik yang melanggengkan konstruksi sosial. Hal tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan.

Posisi pembaca dalam wacana tersebut cenderung turut melanggengkan posisi inferior perempuan. Banyak cuitan yang menginvalidasi suara serta pengalaman perempuan dengan sebutan-sebutan misoginis dan merendahkan. Dalam hal ini, pengaruh pemahaman patriarki pembaca menganggap bahwa marjinalisasi terhadap perempuan ialah sesuatu hal yang wajar. Wacana yang dominan ini kemudian menciptakan siklus di mana kedudukan perempuan tetap dianggap lebih rendah, dan suara serta peran perempuan dalam masyarakat terus direduksi.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4

rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah berjudul "Posisi Perempuan dalam Pemilu 2024 pada Media Sosial X: Kajian Analisis Wacana Kritis Sara Mills" dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yaitu Pak Anwar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama proses bimbingan penulisan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada Ibu yang memberikan kelancaran penulis selama menempuh studi. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menempuh studi serta penyelesaian karya ilmiah ini.

DAFTAR ISI

Adichie, Chimamanda Ngozi. (2014). *We Should All Be Feminists*. New York, Anchor Books.

Ardiansa, Dirga. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Basirun, Irawati, Sulsalman Moita dan Syaifudin S. Kasim. (2024). Perempuan Dipentas Politik: Sebuah Analisis dengan Perspektif Gender. *Jurnal Neo Societal*. Sulawesi Tenggara: Universitas Halu Oleo.

BBC News Indonesia. (10 Agustus. 2024). Keluarga korban penculikan 97-98 diklaim diberi 'uang Rp1 miliar' oleh petinggi Gerindra - 'Upaya sistematis menutup pertanggungjawaban Prabowo', Diakses pada tanggal 2 September 2024 dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjdklz2ye82o

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya.

Embun Sari, Putri, Eka Mariyanti dan Siska Lusia Putri. (2024). Analisis Persepsi Pemilih Terhadap Penampilan Calon Dan Dampaknya Terhadap Pemilihan Calon Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Padang: Universitas Dharma Andalas.

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.

Fraser, Nancy. (2013). *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*. Verso: London/New York.

Horan, Geraldine. (2019). *Feminazi, breastfeeding nazi, grammar nazi. A critical analysis of nazi insults in contemporary media discourses*, mediAzioni 24, http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382.

Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N. Nurhasim, M. (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*.

Hasfi, Nurul, dkk. (2017). Representasi Kepemimpinan Calon Presiden di Twitter. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 2, Januari, Hal 270-284.

Hasyim, N. (2021). *Good Boys Doing Feminism: Maskulinitas dan Masa Depan Laki-Laki Baru*. EA Books.

Kemal, Faisal dan Taufik Indarto. (2023). Stereotipe Perempuan Dalam Wacana Pemberitaan Pra-Pemilu 2024 Pada Media Massa Daring. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia.* Kendari: Universitas Muhammadiyah.

Mills, Sara. (1995). *Feminist Stylistics*. London: Routledge.

Nasir, I. (2020). *Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan*. Khazanah Hukum, 2(1), 41-50.

Ramdhan, Fajri. (20 Februari. 2024). Tirto. Id: Hasil Suara Rasyid Rajasa Caleg DPR RI 2024 dan Apa Kasusnya? Diakses pada tanggal 5 November 2024 dari https://tirto.id/hasil-suara-rasyid-rajasa-caleg-dpr-ri-2024-apa-kasusnya-gV4P

Rohana & Syamsuddin. (2015). *Analisis Wacana*. CV. Samudra Alif-Mim.

Ilmu Budaya
Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
e-ISSN 2549-7715 | Volume 9 | Nomor 2 | April 2025 | Halaman 277—292
Terakreditasi Sinta 4
Sadewo, Joko. (19 Januari. 2022). Ini Alasan PKS Menolak RUU TPKS/PKS. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024 dari https://news.republika.co.id/berita/r5x2nm318/ini-alasan-pks-menolak-ruu-tpkspks

Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Wahana Kebudayaan Secara Linguistik.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sutarso, J. (2011). *Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing Komuniti*, I(1), 1–19.